



KOTA BATAM

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

TAHUN 2024



KECAMATAN NONGSA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Nongsa adalah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Nongsa periode 2021 - 2026, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (Stakeholders) di tingkat Kecamatan Nongsa, dan Rencana Reformasi Birokrasi di Kantor Kecamatan Nongsa. Selain itu, Lakip ini juga di susun dengan berpedoman pada Renstra 2021 – 2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan Misi pembangunan, serta Visi Kota Batam 2023, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2021 – 2026.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staff Kantor Kecamatan Nongsa harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Kecamatan Nongsa yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan Kesejahteraan Masyarakat, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan / revisi muatan renstra termasuk indikator – indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Nongsa periode 2021 – 2026 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD 2021 – 2026.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Nongsa Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Batam, 21 Februari 2025

CAMAT NONGSA

KOTA BATAM



ARFANDI, S.STP, MH

Pembina Tk.I/ IVb

NIP. 19831116 200212 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nongsa Kota Batam Tahun Anggaran 2024 ini memberikan gambaran tentang kinerja yang di capai oleh Kecamatan Nongsa Kota Batam dalam Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat ukur Akuntabilitas Kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam mengimplimentasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nongsa Kota Batam guna peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Kecamatan Nongsa Kota Batam senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (good governance) dalam meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kecamatan Nongsa Kota Batam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 33.059.549.312,00- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 21.687.413.312,00-, Belanja Modal sebesar Rp. 11.372.136.000,00-. Realisasi Belanja Kecamatan Nongsa Kota Batam sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 31.052.196.845,00- atau sebesar 93,93%. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Susunan Organisasi	4
1.4. Sumber Daya Aparatur	5
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi	
1.6. Maksud dan Tujuan	
1.7. Dasar Hukum	
1.8. Sistematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Visi dan Misi Kecamatan Nongsa	
2.2. Rencana Strategis	
2.3. Rencana Kerja Tahunan	
2.4. Program dan Kegiatan	
2.5. Perjanjian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Kinerja	
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	
3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan	
3.4. Evaluasi Kinerja	
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	1.1. Luas Wilayah di Kecamatan Nongsa.....	3
Tabel	1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Nongsa.....	3
Tabel	1.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Nongsa Menurut Golongan.....	5
Tabel	1.4. Jumlah Pegawai Kecamatan Nongsa Menurut Tingkat Pendidikan.....	<u>6</u>
Tabel	2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Nongsa Tahun 2021-2026.....	32
Tabel	2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Nongsa Tahun 2023.....	<u>33</u>
Tabel	2.3. Sasaran Strategis Kecamatan Nongsa Tahun 2023.....	<u>35</u>
Tabel	2.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nongsa.....	<u>36</u>
Tabel	2.5. Target Kinerja Kecamatan Nongsa Tahun 2023.....	<u>33</u>
Tabel	2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	<u>44</u>
Tabel	3.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Nongsa Tahun 2023.....	47
Tabel	3.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Nongsa Tahun 2023.....	48
Tabel	3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Nongsa Tahun 2023.....	49
Tabel	3.4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Nongsa Tahun 2023.....	51
Tabel	3.5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Nongsa Tahun 2023.....	51
Tabel	3.6. Tabel Dokumen Penggunaan Anggaran Kecamatan Nongsa Tahun 2023.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bertanggung-jawab (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait dengan upaya tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem pelaporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, cepat, dan akurat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kebijaksanaan otonomi daerah melalui Undang-undang 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping tugas tersebut, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk itu, agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang dan relevan dengan potensi dan hambatan yang ada.

Gambaran Umum

Kecamatan Nongsa secara geografis terdiri daerah pesisir/hinterland, dengan kriteria tersebut maka kecamatan ini mempunyai potensi yang baik untuk di kembangkan usaha seperti budi daya laut, wisata bahari. Penduduk asli yang sebagian besar bermata pencarian sebagai Nelayan Tradisional.

Kecamatan Nongsa terletak pada sebelah timur laut dari wilayah pulau Batam atau Wilayah Barelang dengan posisi 1.000-1.18 lintang utara dan 104.000-104.150.

Kecamatan Nongsa terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Kabil
2. Kelurahan Batu Besar
3. Kelurahan Sambau
4. Kelurahan Ngenang

Kecamatan Nongsa berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Laut Singapura
Sebelah Selatan	: Kecamatan Galang, Kecamatan Bulang
Sebelah Barat	: Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Ampar
Sebelah Timur	: Kabupaten Bintan

Tabel 1.1.**Luas Wilayah di Kecamatan Nongsa**

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km²)
1	Kelurahan Kabil	48,11 Km ²
2	Kelurahan Batu Besar	96,68 Km ²
3	Kelurahan Sambau	64,09 Km ²
4	Kelurahan Ngenang	81,47 Km ²
Jumlah		290,35 Km²

Jumlah penduduk Kecamatan Nongsa yang tercatat dalam Data Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebanyak 96.037 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2.**Jumlah Penduduk Kecamatan Nongsa**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk WNI dan WNA		
		Laki-laki	Perempuan	(L+P)
1	Kabil	20.695	19.052	39.747
2	Batu Besar	19.750	18.648	38.398
3	Sambau	8.429	7.895	16.324
4	Ngenang	802	766	1.568
	Jumlah	49.676	46.361	96.037

Sumber : Agregat Sem. 2 Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam, maka Kecamatan Nongsa Kota Batam dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai uraian tugas:

- a. menetapkan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Kecamatan yang meliputi Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. membina bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara memberikan penghargaan dan hukuman untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja, serta rencana kerja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. mengoordinasikan data dan informasi bahan-bahan Musyawarah (MUSRENBANG) Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan sebagai rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Daerah;
 - i. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
 - j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya;
 - k. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pemeliharaan pasarana dan fasilitas pelayanan umum pada lingkup Kecamatan;
 - l. mengoordinasikan dan membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - m. menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - n. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;

- o. mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah Kecamatan;
- p. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi penzman, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan serta penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan pada lingkup Kecamatan;
- q. menyelenggarakan pengawasan, pembinaan, jaringan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga, forum, komite serta tokoh masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;•
- r. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan;
- s. mengusulkan/ menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
- u. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan;
- v. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Kecamatan;
- w. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan kepada para Kepala Seksi;
- x. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan;

- y. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- z. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan;
- aa. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir;
- bb. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
- cc. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan;
- dd. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- ee. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan;
- ff. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- gg. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara;
- hh. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

- ii. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- jj. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Kecamatan; dan
- kk. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan berdasarkan peraturan-perundangan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan pada lingkup Kecamatan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Kecamatan;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di masing-masing unit Kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset pada lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah dilingkungan Kecamatan yang meliputi: Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai peraturan perundang• undangan;
- h. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Kecamatan yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang• undangan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;
 - j. mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, dan IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - k. memeriksa, memaraf, dan/ a tau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - l. pengendalian pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM pada masing-masing Seksi di lingkup Kecamatan;
 - m. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
 - n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk menyusun program rencana kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Program dan Keuangan agar sasaran tetap terfokus;
- d. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- e. menyusun bahan kebijakan operasional program sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta mengatur mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan dan menyiapkan bahan konsep naskah dinas urusan keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan di lingkungan Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Kecamatan;
- h. mengompilasi penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan

unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas;

- i. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan;
- j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- k. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan Kebijakan Camat.
- m. menyusun dan/ atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Kecamatan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Camat;
- n. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
- o. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Kecamatan;
- p. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. menyusun dan/ atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- r. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Kecamatan;
- s. menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Kecamatan;
- t. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Kecamatan;
- u. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Kecamatan meliputi inventarisasi, penyimpanan, dan Pelaporan;
- v. mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- w. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan keuangan;
- x. membuat Pohon Kinerja Perangkat Daerah;
- y. menyusun Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah;
- z. melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- aa. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- bb. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- cc. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
- f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan Kecamatan;
- h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di lingkungan Kecamatan;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor;
- j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;

- k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- l. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperurn, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkup Kecamatan;
- n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- o. melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi lingkup Kecamatan;
- q. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat daerah di lingkup Kecamatan;

- r. melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup Kecamatan;
- s. melakukan penyusunan SOP, SPP dan IKM pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- t. mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- u. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program rencana kerja dan kegiatan pada Seksi Pemerintahan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Pemerintahan;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pemerintahan;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepadabawahan sesuai dengan program rencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Pemerintahan tingkat Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya;
- g. menyelenggarakan tugas pembantuan di lingkup Pemerintahan Kecamatan;
- h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Pemerintahan;
- J. mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- k. merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Pemerintahan;
- l. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat pada lingkup tata Pemerintahan Kecamatan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program rencana kerja dan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. rumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban pada lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/ a tau Komando Rayon Militer, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap penanggulangan dan pencegahan bencana di wilayah kerja Kecamatan;

- j. melakukan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- l. mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- m. merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- n. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum lingkup Kecamatan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pelayanan Umum;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pelayanan Umum;

- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Pelayanan Umum lingkup Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilingkup Kecamatan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- h. mengkoordinasikan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan di wilayah Kecamatan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan serta pembinaan terhadap inventaris aset-aset Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah kerja Kecamatan;
- j. melaksanakan koordinasi pem binaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas fisik pelayanan umum;
- k. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Pelayanan Umum;
- l. mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- m. merumuskan SOP, SPP, dan !KM pada lingkup Seksi Pelayanan Umum;
- n. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan umum lingkup Kecamatan;

- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesejahteraan Masyarakat lingkup Kecamatan;
- f. melakukan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan pada lingkup tugasnya;
- g. melakukan koordinasi pembinaan dan pengendalian Keluarga Berencana (KB), serta pengembangan Kesejahteraan Masyarakat pada lingkup tugasnya;
- h. melakukan koordinasi pembinaan keagamaan, organisasi sosial dan kemasyarakatan lingkup tugasnya;

- i. melakukan koordinasi pembinaan, pengendalian dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada lingkup tugasnya;
- J. melakukan pengawasan dan koordinasi kewaspadaan pangan gizi lingkup Kecamatan;
- k. melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga lingkup tugasnya;
- l. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- m. mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- n. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lingkup Kecamatan;
- o. merumuskan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat; Jan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

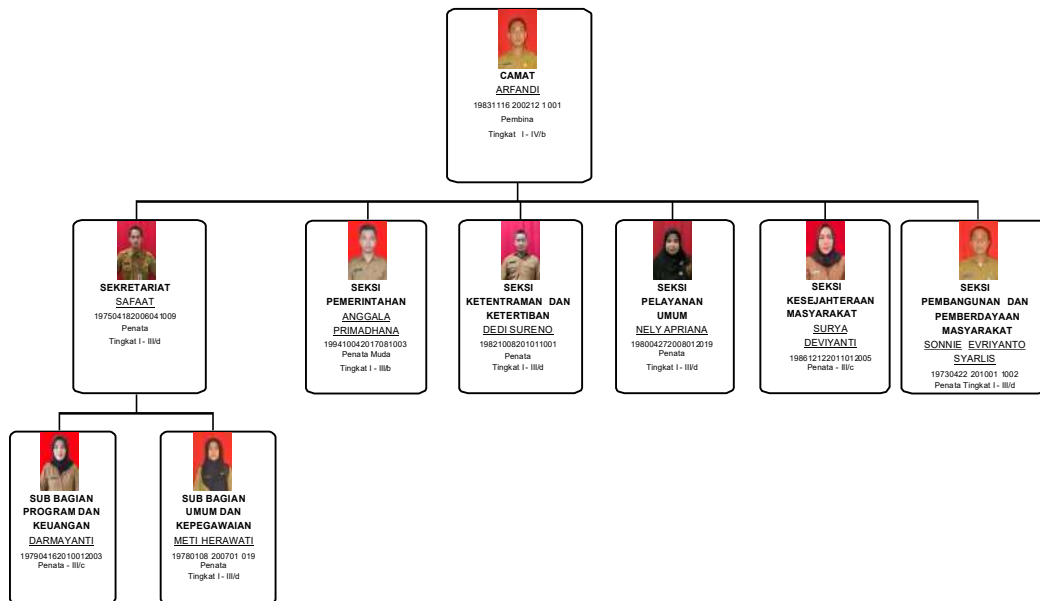
- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kecamatan;
- g. melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan lingkup tugasnya;
- i. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi di Wilayah Kecamatan;

- j. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, pariwisata serta lingkungan hidup di wilayah kerjanya;
- k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- l. mengonsep dan/ atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- m. merumuskan dan menetapkan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Kecamatan;
- n. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Struktur Organisasi Kecamatan Nongsa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

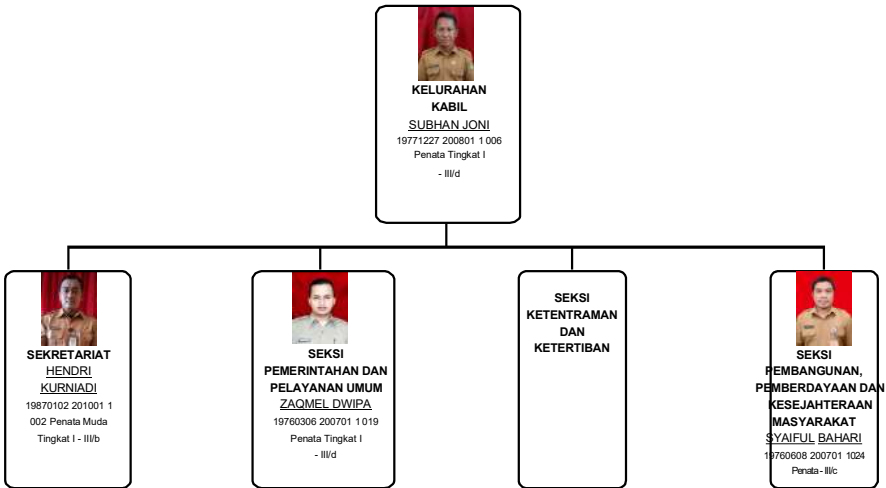
KECAMATAN NONGSA



KELURAHAN BATU BESAR



KELURAHAN KABIL



KELURAHAN SAMBAU



KELURAHAN NGENANG



c. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh ketersediaan personil (SDM) pada organisasi tersebut, yang tidak saja dilihat dari kuantitasnya akan tetapi juga dipandang dari sisi kualitas atau kompetensi SDM tersebut. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak diperkuat dengan kualitasnya sumber daya manusianya, maka roda organisasi tersebut tidak maksimal dalam operasionalnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Nongsa didukung oleh sejumlah personil/Sumber Daya Manusia. Berikut data per 31 Desember 2024 dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai Kecamatan Nongsa Menurut Golongan

NO	URAIAN	Menurut Golongan				JUMLAH
		GOL.I	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	
1	Struktural	-	-	28	1	29
2	Staf	1	12	9	1	23
3	Honorer	-	-	-	-	18
JUMLAH		1	12	37	2	70

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Nongsa 2024

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Kecamatan Nongsa Menurut Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	Menurut Pendidikan								JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	
1	Struktural					4	3	18	4	29
2	Staf	1		15		3		3	1	23
3	Honorer			10		1		5		16
JUMLAH										70

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Nongsa 2024

C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

LKjIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota Batam dan masyarakat. Kedua, LKjIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Nongsa sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh Pemerintah Kecamatan Nongsa.

Maksud dan tujuan penyusunan dalam penyampaian LKjIP Kecamatan Nongsa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2024 sebagai saran pertanggungjawaban Kecamatan Nongsa atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024
- 2) Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian oleh manajemen Kecamatan Nongsa bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Nongsa ini dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah sehingga LKjIP dibuat secara periodik.

D. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Nongsa Tahun 2024 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
2. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Perda No 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
8. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Kecamatan Dan Kelurahan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nongsa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan). Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta Kebijakan Strategis Kecamatan Nongsa.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategis instansi pemerintah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, dan program serta ukuran dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Potensi peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kecamatan Nongsa dalam mengemban misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adalah kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya.

Proses penyusunan renstra dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Kota Batam. Dari visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kepada tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.

Visi pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”.

Misi Kota Batam adalah:

Misi Pertama

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Misi Kedua

Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Misi Ketiga

Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

Misi Keempat

Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Misi Kelima

Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Nongsa Kota Batam berada dalam misi yaitu

Misi pertama

Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Misi ketiga

Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

VISI DAN MISI KECAMATAN NONGSA

VISI

“Terwujudnya Kecamatan Nongsa Sebagai Tujuan Wisata Yang Maju Berbudaya dan Religius dengan Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan Berakhlak Mulia ”

MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan maka Kecamatan Nongsa memiliki beberapa misi sehingga menjadi suatu kesatuan tekad yang terwujud tahun per tahun secara bertahap sesuai dengan rencana strategis lima tahunan, untuk hal tersebut beberapa misi Pemerintah Kecamatan Nongsa sebagai berikut:

1. Mempertahankan potensi wisata, nilai seni dan budaya lokal dengan menjadikan agenda kegiatan tahunan yang melibatkan partisipasi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas aparatur yang baik, bersih dan berwibawa serta mengembangkan sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan dilandasi Iman dan Taqwa (IMTAQ);

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat khususnya di wilayah pesisir (*hinterland*);
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan aparatur dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengaju kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nongsa Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Kecamatan Nongsa mengidentifikasikan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan masyarakat dengan cepat dan lancar di semua bidang.

2. Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi maupun kelembagaan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan etos kerja dan kinerja aparatur.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.
6. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kualitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun guna mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran Kecamatan Nongsa diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Ada pun sasaran Kecamatan Nongsa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Layanan Masyarakat melalui pembuatan KTP, KK, Kartu Pencari Kerja (Ak 1), dan surat menyurat lainnya.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
4. Meningkatkan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung dan mensukses program pemerintah.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi maupun kelembagaan pemberdayaan masyarakat melalui diklat, bimtek, dan pelatihan ketrampilan, sosialisasi dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan.
6. Meningkatkan etos kerja dan kinerja melalui pembinaan tugas belajar dan workshop.
7. Meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masyarakat melalui pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
8. Meningkatnya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan event-event.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Nongsa Kota Batam

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Nongsa yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	55.50%	59.25%	61.75%	64.50%	67.25%	71.25%	71.25%
			Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	80%	82%	87%	90%	92%	95%	95%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Nongsa yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82%	88.31%	89%	90%	91%	92%	92%
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Kecamatan Nongsa mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan di dalam suatu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh sasaran strategis, kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nongsa kemudian diformulasikan di dalam Rencana Kinerja Tahunan. Dalam rencana kinerja tahunan diuraikan dan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Nongsa untuk mencapainya dalam satu periode tahunan, dan merupakan benchmark dalam proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Kecamatan Nongsa disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian dikompilasi ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Nongsa (Formulir RKT). Dokumen tersebut menyajikan target kinerja Kecamatan Nongsa Tahun 2024, dan merupakan komitmen penuh dalam mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misi Kecamatan Nongsa. Fokus utama dalam penetapan Rencana Kinerja Tahun 2024 adalah alokasi sumber dana dan sumber daya yang dimiliki dan usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

a. Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Nongsa Kota Batam meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Penetapan Sasaran Strategis

Kecamatan Nongsa mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin di capai tahun 2024. Untuk setiap sasaran strategis yang ada di identifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis, di identifikasikan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang telah ditetapkan, Kecamatan Nongsa merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Nongsa menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

b. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Kecamatan Nongsa telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai, juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran tersebut, termasuk indikator kinerjanya beserta target kinerja kuantitatif dalam rangka mencapai kinerja yang paling maksimal dalam bentuk rencana kinerja tahun 2024.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintahan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Nongsa menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Nongsa Kota Batam Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan	90%
2.	Meningkatnya pelayanan public yang cepat, tepat,transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana	100%
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100%

Untuk pencapaian indikator kinerja diatas akan dilaksanakan melalui program kegiatan sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Kecamatan Nongsa Kota Batam 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN
	KECAMATAN NONGSA			19.985.391.424
1.	Program Pengolahan Sampah	Persentase Pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10	1.906.632.000
	Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah	100	1.906.632.000
	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2880 Ton	1.906.632.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100	11.808.474.324
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	10.849.658.936
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Orang	10.849.658.936
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	70.555.200
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	1 Paket	1.443.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.996.750
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.580.000
	Penyediaan barang cetakan	Jumlah Paket Barang	2 Paket	15.535.450

	dan penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	740.159.688
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	179.824.296
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	12 Laporan	560.335.392
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	100	148.100.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	72.660.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	10.660.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100	4.364.200.100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	4.364.200.100

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 3 Laporan Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	178.700.100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	4.185.500.000
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100	84.000.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100	84.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	30.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	100 Keluarga	24.000.000

		Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100	1.822.085.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100	1.822.085.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	189.354.000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3284 Orang	1.269.995.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	362.736.000
	KELURAHAN SAMBAU			3.912.322.496
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	189.232.496

		daerah		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	114.299.500
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	515.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.728.500
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.469.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.587.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	74.932.996
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.190.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.742.996
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100	3.723.090.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan	100	3.529.090.000

		pemberdayaan		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	3.503.484.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	19.006.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100	194.000.000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	100 Keluarga	35.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	24.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	100 Keluarga	35.000.000
	KELURAHAN BATU BESAR			3.605.449.596
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	201.000.396
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	114.299.500
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	515.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.728.500
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.469.000

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.587.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	86.100.896
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.357.900
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.742.996
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	100	600.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Laporan	600.000
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100	3.404.449.200
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	100	3.210.449.200
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000

	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	3.184.843.200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	D. Pokmas/Ormas	19.006.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100	194.000.000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	35.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	100 Keluarga	24.000.000

	dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	100 Keluarga	35.000.000
	KELURAHAN KABIL			3.890.134.896
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	198.042.496
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	114.299.500
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	515.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.728.500
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.469.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	2 Paket	3.587.000

		Penggandaan yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	83.142.996
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.400.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.742.996
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100	3.692.092.400
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	100	3.498.092.400
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	3.472.486.400
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	19.006.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100	194.000.000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan	100 Keluarga	35.000.000

		Ketahanan Pangan Keuarga		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	24.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	100 Keluarga	35.000.000
	KELURAHAN NGENANG			1.666.250.900

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	213.322.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	114.299.500
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	515.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.728.500
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	106.469.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.587.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	99.023.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.537.008
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.485.992
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	100	1.452.928.400
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	100	1.258.928.400

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.233.322.400
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	19.006.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100	194.000.000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	35.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30.000.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	100 Keluarga	24.000.000

		Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	100 Keluarga	35.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nongsa merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kecamatan Nongsa untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Nongsa. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan hasil pencapaian kinerja instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, skala nilai peringkat kinerja ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini;
- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.2

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	2023			2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	87	87	87	90	100	100
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik Yang Terlaksana	100	100	100	100	100	100

	dengan memanfaatkan Teknologi Informasi							
3	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100	97.67	97.67	100	96.96	96.96

Tabel 3.3

Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	Capaian 2024 (%)	Target Akhir 2026 (%)	Tingkat Kemajuan (%)
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	100	100	100
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik Yang Terlaksana	100	100	100
3	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	96.96	100	96.96

Tabel 3.4
Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Ke- gagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	90	100	100	Berhasil mencapai target	-
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik Yang Terlaksana	100	100	100	Berhasil mencapai target	-
3	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100	96.96	96.96	Sub kegiatan pspk yang tidak mencapai 100 % dikarenakan ada beberapa titik lokasi yang terkendala berbagai hal sehingga pspk nya belum bisa dikerjakan	Melakukan survey kembali terhadap titik lokasi yang ingin dikerjakan

Tabel 3.5

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	(%) Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	(%) Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	90				Menunjang
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10	
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	90	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik Yang Terlaksana	100				Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	

				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100	
3	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dan	Persentase Usulan Masyarakat melalui				96.96	Menunjang

	Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Musrenbang Yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan					
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.Persentase RT/RW/LPM aktif 2.Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	93.93	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan	91.64	

					Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		
--	--	--	--	--	---	--	--

Untuk lebih memaksimalkan pengukuran capaian kinerja tahun 2024, maka dibawah ini akan ditampilkan dalam tabel capaian kinerja tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra
OPD

No	Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Nongsa 2021-2026								Realisasi Kinerja Tahun 2024			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	80%	82%	87%	90%	92%	95%	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	90%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	100%

3	Meningkatnya Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100%	96.96%
---	---	---	------	------	------	------	------	------	---	--	------	--------

Untuk mengetahui dan menganalisa tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 dan perbandingan penggunaan dana tahun 2024, maka dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Tahun 2023		Persentase	Tahun 2024		Persentase	Ket.
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.258.150.745,00	10.878.109.064,00	96.62	12.610.072.212,00	12.245.062.456,00	97.10	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.407.432.000,00	1.353.850.500,00	96.19	1.822.085.000,00	1.672.044.650,00	91.76	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10.937.444.540,00	10.682.681.816,00	97.67	12.356.560.000,00	10.930.044.510,00	89.76	
4	Program Pengelolaan Persampah	1.994.503.640,00	1.979.271.397,00	99.24	1.906.632.000,00	1.892.006.289,00	99.23	
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.908.255.000,00	2.860.624.250,00	98.36	4.364.200.100,00	4.313.038.940,00	98.82	
	JUMLAH	28.505.785.925,00	27.754.537.027,00	97.36	33.059.549.312,00	31.052.196.845,00	93.93	

Melihat tampilan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa, capaian kerja anggaran/realisasi anggaran tahun 2023 sebesar **Rp27.754.537.027.00** atau sebesar **97.36%** dan tahun 2024 sebesar **Rp 31.052.196.845.00** atau sebesar **93.93%**.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Belanja yang berdasarkan realisasi keuangan dan realisasi fisik Kecamatan Nongsa Kota Batam pada 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai Berikut:

Tabel 3. 8
Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Nongsa Kota Batam

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	KECAMATAN NONGSA		19.985.391.424	19.482.261.824	97,483
1.	Program Pengolahan Sampah	Persentase Pengangkutan sampah yang tidak tuntas	1.906.632.000	1.892.006.289	99,233
	Pengelolaan Sampah	Persentase pengangkutan sampah	1.906.632.000	1.892.006.289	99,233
	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1.906.632.000	1.892.006.289	99,233
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	11.808.474.324	11.523.823.045	97,589
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	10.849.658.936	10.650.126.265	98,161
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	10.849.658.936	10.650.126.265	98,161
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	70.555.200	Rp. 66.415.425	94,133
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	1.443.000	1.389.000	96,258
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.996.750	30.041.000	96,917
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22.580.000	21.469.000	95,080
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15.535.450	13.516.425	87,004
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	740.159.688	699.336.355	94,485
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	179.824.296	143.188.313	79,627
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	560.335.392	556.148.042	99,253

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	148.100.500	107.945.000	72,886
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39.780.000	38.150.000	95,902
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72.660.500	35.001.000	48,171
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.660.000	10.350.000	97,092
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25.000.000	24.444.000	97,776
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	4.364.200.100	4.313.038.940	98,828
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.364.200.100	4.313.038.940	98,828
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 3 Laporan Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	178.700.100	172.538.940	96,552
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.185.500.000	4.140.500.000	98,925
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	84.000.000	81.348.900	96,844
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	84.000.000	81.348.900	96,844
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	29.013.000	96,710
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30.000.000	28.970.000	96,567
	Penumbuhan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	24.000.000	23.365.900	97,358

	Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	1.822.085.000	1.672.044.650	91,765
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	1.822.085.000	1.672.044.650	91,765
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	189.354.000	180.767.550	95,465
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.269.995.000	1.225.443.500	96,492
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	362.736.000	Rp. 265.833.600	73,286
	KELURAHAN SAMBAU		3.912.322.496	Rp. 3.652.117.558	93,349
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	189.232.496	Rp. 173.043.838	91,445
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	114.299.500	Rp. 111.744.500	97,765
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	515.000	Rp. 405.000	78,641
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.728.500	Rp. 3.272.000	87,756
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	106.469.000	Rp. 104.712.000	98,350
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.587.000	Rp. 3.355.500	93,546
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	74.932.996	Rp. 61.299.338	81,806
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	33.190.000	Rp. 19.856.114	59,826
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	41.742.996	Rp. 41.443.224	99,282

		Disediakan			
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	3.723.090.000	Rp. 3.479.073.720	93,446
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	3.529.090.000	Rp. 3.288.713.000	93,189
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	Rp. 6.300.000	95,455
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3.503.484.000	Rp. 3.263.766.000	93,158
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.006.000	Rp. 18.647.000	98,111
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	194.000.000	Rp. 190.360.720	98,124
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	35.000.000	Rp. 34.171.000	97,631
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	Rp. 29.640.200	98,801
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	Rp. 34.269.440	97,913
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.000.000	Rp. 23.647.800	98,533
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	Rp. 34.366.140	98,189
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	35.000.000	Rp. 34.266.140	97,903
	KELURAHAN BATU		3.605.449.596	Rp.	88,093

	BESAR			3.176.132.396	
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	201.000.396	Rp. 175.478.416	87,303
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	114.299.500	Rp. 105.187.000	92,028
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	515.000	Rp. 455.000	88,350
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.728.500	Rp. 3.410.000	91,458
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	106.469.000	Rp. 98.946.000	92,934
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.587.000	Rp. 2.376.000	66,239
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	86.100.896	Rp. 69.991.416	81,290
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	44.357.900	Rp. 28.548.192	64,359
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41.742.996	Rp. 41.443.224	99,282
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000	Rp. 300.000	50,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000	Rp. 300.000	50,000
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	3.404.449.200	Rp. 3.000.653.980	88,139
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	3.210.449.200	Rp. 2.811.818.780	87,583
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	Rp. 6.350.000	96,212
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3.184.843.200	Rp. 2.786.828.900	87,503
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.006.000	Rp. 18.639.880	98,074
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	194.000.000	Rp. 188.835.200	97,338
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	35.000.000	Rp. 33.947.000	96,991

		Keuarga			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	Rp. 29.640.200	98,801
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	Rp. 34.046.600	97,276
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.000.000	Rp. 23.697.800	98,741
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	Rp. 33.865.000	96,757
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	35.000.000	Rp. 33.638.600	96,110
	KELURAHAN KABIL		3.890.134.896	Rp. 3.295.935.379	84,725
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	198.042.496	Rp. 173.270.709	87,492
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	114.299.500	Rp. 110.108.000	96,333
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	515.000	Rp. 405.000	78,641
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.728.500	Rp. 3.546.000	95,105
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	106.469.000	Rp. 103.085.000	96,822
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.587.000	Rp. 3.072.000	85,643
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	83.142.996	Rp. 62.862.709	75,608
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	41.400.000	Rp. 21.419.485	51,738
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	41.742.996	Rp. 41.443.224	99,282

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak Fungsi	600.000	Rp. 300.000	50,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000	Rp. 300.000	50,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	3.692.092.400	Rp. 3.122.664.670	84,577
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	3.498.092.400	Rp. 2.933.837.000	83,870
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	Rp. 6.500.000	98,485
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3.472.486.400	Rp. 2.908.758.000	83,766
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.006.000	Rp. 18.579.000	97,753
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	194.000.000	Rp. 188.827.670	97,334
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	35.000.000	Rp. 33.911.000	96,889
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	Rp. 29.640.200	98,801
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	Rp. 34.046.600	97,276
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.000.000	Rp. 23.619.870	98,416
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	Rp. 33.805.000	96,586
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	35.000.000	Rp. 33.805.000	96,586

	KELURAHAN NGENANG		1.666.250.900	Rp. 1.445.749.688	86,767
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	213.322.500	Rp. 199.446.448	93,495
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	114.299.500	Rp. 110.658.500	96,815
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	515.000	Rp. 455.000	88,350
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.728.500	Rp. 3.476.000	93,228
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	106.469.000	Rp. 103.655.500	97,357
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.587.000	Rp. 3.072.000	85,643
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	99.023.000	Rp. 88.787.948	89,664
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15.537.008	Rp. 5.901.500	37,984
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83.485.992	Rp. 82.886.448	99,282
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.452.928.400	Rp. 1.246.303.240	85,779
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun • 2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	1.258.928.400	Rp. 1.056.934.000	83,955
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.600.000	Rp. 6.500.000	98,485
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1.233.322.400	Rp. 1.031.865.000	83,665
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19.006.000	18.569.000	97,701
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	194.000.000	189.369.240	97,613
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keiuarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keiuarga	35.000.000	33.971.000	97,060
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	umlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30.000.000	29.582.700	98,609

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	35.000.000	34.046.600	97,276
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	24.000.000	23.697.800	98,741
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	35.000.000	33.805.000	96,586
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian 100 Keluarga Lingkungan Hidup	35.000.000	34.266.140	97,903

BAB IV

PENUTUP

Setelah melakukan analisis kinerja dan keuangan, secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan Kecamatan Nongsa Tahun 2024 dapat dikatakan telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

Seluruh capaian kinerja tersebut di atas memberikan pelajaran yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga LKjIP Kecamatan Nongsa Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

PARAF HIERARKI		
Sekcam	SAFARI	
Kasi/Kasubag	YANTI	

Batam, 21 Februari 2025

**CAMAT NONGSA
KOTA BATAM**



AREANDI, S.STP, MH

Pembina Tk.I/ IVb

NIP. 19831116 200212 1 001